

Tema : Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan di Wilayah *Wetlands*

Sub Tema : Pengembangan model atau kebijakan terkait dengan pengelolaan Sumberdaya Alam dan lingkungan wilayah *wetlands*

**USULAN PENELITIAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
SKEMA PENELITIAN UNGGULAN**



**KOMUNIKASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DELIBERATIF  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN  
SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN  
PELALAWAN**

**Tim Peneliti :**

<b>Ketua</b>	<b>: Dr. Hasim As'ari. S.Sos., M.Si</b>	<b>NIDN. 0014117904</b>
<b>Anggota</b>	<b>: Prof. Dr. Sujianto, M..Si</b>	<b>NIDN. 0028096201</b>
<b>Anggota</b>	<b>: Syofian, S.Sos., M.Si</b>	<b>NIDN. 1003108801</b>
<b>Anggota</b>	<b>: Dedi Kusuma Habibie, S.IP., MPA</b>	<b>NIDN. 0015129102</b>

**SUMBER DANA : DIPA LPPM UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2020**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS RIAU  
MARET 2020**

## HALAMAN PENGESAHAN KEGIATAN PENELITIAN

1. Judul Penelitian : Komunikasi Implementasi Kebijakan Deliberatif Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Kabupaten Pelalawan
2. Ketua Pelaksana
  - a. Nama : Dr. Hasim As'ari. S.Sos., M.Si
  - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
  - c. NIP dan NIDN : 0014117904
  - d. Jabatan Struktural : -
  - e. Jabatan Fungsional : Lektor
  - f. Fakultas/Jurusan : FISIP / Ilmu Administrasi Publik
  - g. Alamat Kantor : Kampus Bina Widya  
Jalan HR. Soebrantas 1 Simpang Baru, Tampan, Pekanbaru
  - h. Telepon/Fax : 0761- 63277
  - i. Alamat Rumah : Jalan Karya Bakti No. 9 Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya
  - j. HP/e-mail : 081365667787/ hasimasari@lecturer.unri.ac.id
3. Anggota 1
  - a. Nama Lengkap : Prof. Dr. Sujianto, M.Si
  - b. Jabatan Fungsional : Guru Besar
  - c. NIDN : 0028096201Anggota 2
  - a. Nama Lengkap : Syofian, S.Sos., M.Si
  - b. Jabatan Fungsional : -
  - c. NIDN : 1003108801Anggota 3
  - a. Nama Lengkap : Dedi Kusuma Habibie, S.IP., MPA
  - b. Jabatan Fungsional : -
  - c. NIDN : 0015129102
4. Jangka Waktu Penelitian : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun
5. Pembiayaan
  - a. Dana diusulkan/disetujui : Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
  - b. Sumber Dana : DIPA LPPM Universitas Riau Tahun 2020

Pekanbaru, 12 Maret 2020

Ketua Peneliti,



Dr. Hasim As'ari. S.Sos., M.Si  
NIP. 197911142008121001

Menyetujui :  
Ketua LPPM Universitas Riau

Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP.  
NIP. 196008221990021002

## **IDENTITAS ANGGOTA KEGIATAN PENELITIAN**

### **1. Ketua Tim**

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| a. Nama Lengkap             | : Dr. Hasim As'ari. S.Sos., M.Si        |
| b. Jenis Kelamin            | : Laki - laki                           |
| c. NIP / NIDN               | : 197911142008121001 / 0014117904       |
| d. Golongan/Pangkat/Jabatan | : Penata/IIIc                           |
| e. Disiplin Ilmu            | : Ilmu Administrasi Publik              |
| f. Fakultas                 | : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
| g. Perguruan tinggi         | : Universitas Riau                      |
| h. Bidang Keahlian          | : Kebijakan Publik                      |
| i. Waktu untuk pembinaan    | : 12 Jam / Minggu                       |

### **2. Anggota 1**

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| a. Nama Lengkap             | : Prof. Dr. Sujianto, M..Si             |
| b. Jenis Kelamin            | : Laki - laki                           |
| c. NIP / NIDN               | : 196009091987031003/ 0028096201        |
| d. Golongan/Pangkat/Jabatan | : Pembina Utama/IV.e                    |
| e. Disiplin Ilmu            | : Ilmu Administrasi Publik              |
| f. Fakultas                 | : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
| g. Perguruan tinggi         | : Universitas Riau                      |
| h. Bidang Keahlian          | : Kebijakan Publik                      |
| i. Waktu untuk pembinaan    | : 10 Jam / Minggu                       |

### **3. Anggota 2**

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| a. Nama Lengkap             | : Syofian, S.Sos., M.Si                 |
| b. Jenis Kelamin            | : Laki - laki                           |
| c. NIP / NIDN               | : 1003108801                            |
| d. Golongan/Pangkat/Jabatan | : -                                     |
| e. Disiplin Ilmu            | : Ilmu Administrasi Publik              |
| f. Fakultas                 | : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
| g. Perguruan tinggi         | : Universitas Riau                      |
| h. Bidang Keahlian          | : Kebijakan Publik                      |
| i. Waktu untuk pembinaan    | : 10 Jam / Minggu                       |

### **4. Anggota 3**

- |                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| a. Nama Lengkap  | : Dedi Kusuma Habibie, S.IP., MPA |
| b. Jenis Kelamin | : Laki - laki                     |

- c. NIP / NIDN : 199112152019031014/0015129102
- d. Golongan/Pangkat/Jabatan : IIIb /-/
- e. Disiplin Ilmu : Ilmu Administrasi Publik
- f. Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- g. Perguruan tinggi : Universitas Riau
- h. Bidang Keahlian : Kebijakan Publik
- i. Waktu untuk pembinaan : 10 Jam / Minggu

## KATA PENGANTAR

Alhamdu lillahi rabbil 'alamin, puji syukur kepada Allah SWT karena atas berkat dan berkah nya peneliti bersama tim penelitian ini bisa menyelesaikan penelitian Dosen Muda tahun pertama peneliti sebagai ketua peneliti. Penelitian ini didedikasikan untuk memberikan insight keilmuan yang terus berkembang, dan memberi manfaat sebagai sumber referensi kepada Peneliti, Dosen, Mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Pemerintah. Sebagai bentuk kewajiban peneliti sebagai dosen yang menjalankan tri dharma perguruan tinggi yaitu penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian tahun pertama, yang dijalankan oleh peneliti sesuai dengan road map penelitian yang dibuat di Universitas Riau sehingga mendukung arah pengembangan inovasi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui LPPM Universitas Riau. Penelitian ini bentuk perhatian peneliti dalam situasi masyarakat dan mengacu kepada kebijakan dan perhatian dari pemerintah nasional maupun daerah dalam mengupayakan kemandirian pangan dan sumberdaya alam.

Terimakasih peneliti ucapkan kepada semua pihak yang terlibat anggota penelitian ini dan mahasiswa yang dilibatkan sebagai enumerator, dalam proses awal penelitian, *field research* dan pendaanaan melalui hibah penelitian oleh LPPM Universitas Riau. Terakhir tak ada gading yang tak retak, kami menyadari penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan masih perlu penyempurnaan didalamnya untuk itu sangat memungkinkan bagi kami peneliti menerima saran dan masukan.

Wassalam. Wr Wb

Pekanbaru, 12 Maret 2020

Ketua peneliti,

## **RINGKASAN PENELITIAN**

Provinsi Riau salah satu provinsi terkaya di Indonesia, dan sumber dayanya didominasi oleh sumber alam, terutama minyak bumi, gas alam, karet, kelapa sawit dan perkebunan serat. Tetapi, penebangan hutan yang merajalela telah mengurangi luas hutan secara signifikan, dari 78% pada 1982 menjadi hanya 33% pada 2005. Rata-rata 160,000 hektare hutan habis ditebang setiap tahun, meninggalkan 22%, atau 2,45 juta hektare pada tahun 2009. Deforestasi dengan tujuan pembukaan kebun-kebun kelapa sawit dan produksi kertas telah menyebabkan kabut asap yang sangat mengganggu di provinsi ini selama bertahun-tahun, dan menjalar ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Perkembangan kegiatan perkebunan di Kabupaten Pelalawan menunjukkan kemajuan yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari semakin luasnya lahan perkebunan dan meningkatnya produksi rata-rata pertahun, dengan komoditas utama kelapa sawit, kelapa dan tanaman lainnya. Namun perkembangan tersebut belum sepenuhnya memberikan dampak yang baik bagi masyarakat di tingkat daerah maupun tingkat nasional, bencana asap, deforestasi, dan hal negatif lainnya yang timbul akibat tata kelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang belum berkelanjutan menjadi dasar peneliti untuk melihat sejauhmana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan memainkan perannya dalam tata kelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pelalawan. Lokus penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, dengan melihat sejauhmana komunikasi implementasi kebijakan deliberatif Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Pelalawan.

Metode yang digunakan adalah Kualitatif, dengan pengumpulan data yang dilakukan observasi langsung dan melakukan wawancara secara purposive sampling. Metode ini dianggap relevan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana komunikasi implementasi kebijakan deliberatif Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Kabupaten Pelalawan

Kata Kunci: Komunikasi Publik, Implementasi Kebijakan, Kebijakan Deliberatif

## DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	
Ringkasan Rencana Penelitian	
Identitas Anggota Kegiatan Penelitian	
Daftar Isi	

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN .....	1
B. PERUMUSAN MASALAH .....	8
C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN.....	8
D. LUARAN/ MANFAAT PENELITIAN.....	9
E. TINJAUAN PUSTAKA .....	9
1. Kerangka Teori .....	9
2. Penelitian Terdahulu .....	19
3. Kerangka Pemikiran.....	21
4. Road Map Penelitian.....	22
F. METODE PENELITIAN.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Lokasi Penelitian .....	23
3. Informan Penelitian.....	23
4. Jenis dan Sumber Data.....	23
5. Teknik Pengumpulan Data.....	24
6. Teknik Analisis Data.....	25
G. JADWAL KEGIATAN .....	25
H. DAFTAR PUSTAKA .....	26
I. REKAPITULASI BIAYA .....	27
J. SUSUNAN ORGANISASI DAN PEMBAGIAN TUGAS TIM .....	28
K. JUSTIFIKASI ANGGARAN .....	29

## LAMPIRAN

## A. Latar Belakang Penelitian

Perbedaan pengaturan, tumpang tindih dan tidak lengkapnya pengaturan tata kelola dalam peraturan perundangan menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan keadilan, kelestarian dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan. Hal tersebut ditunjukkan pula dengan munculnya ketidakpastian hukum, praktik korupsi, terjadinya persaingan antara masyarakat, pemerintah dan swasta yang hingga saat ini masih ditemukan berbagai kasus konflik penguasaan sumber daya alam, hal ini menyebabkan sistem ekonomi yang tidak seimbang, ketimpangan sosial ekonomi akibat tidak terdistribusikannya Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup secara adil masih menjadi pekerjaan pemerintah yang belum selesai.

Dari segi kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait pengaturan sumber daya alam dan lingkungan hidup, berdasarkan kajian harmonisasi regulasi untuk reformasi tata kelola sektor sumber daya alam terhadap 26 undang-undang yang dikaji oleh Direktorat Penelitian Dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2018, terdapat beberapa catatan *Pertama*, lemahnya pemenuhan prinsip tersebut juga menunjukkan sebagian besar undang-undang tidak mengatur lengkap kerangka hukum mulai dari azas-norma dan prosedurnya. *Kedua*, Aspek Kewenangan, Tidak jelasnya pengaturan kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pemanfaatan SDA, serta tidak sinkronnya pengaturan antar perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan perencanaan ruang sehingga menimbulkan tumpang tindih penggunaan ruang SDA, *Ketiga*, Hak dan kewajiban adanya perbedaan pengaturan terkait definisi Masyarakat Hukum Adat, perbedaan pengaturan terkait dengan ruang partisipasi publik masyarakat dan keterbukaan informasi dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang terkait sumber daya alam, perbedaan pengaturan terkait batasan pemanfaatan ruang dan perlindungan hak masyarakat sebagai dampak pemanfaatan ruang.

Kemajuan peradaban manusia saat ini, telah mengakibatkan semakin tingginya ancaman kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pemanfaatan sumber daya alam di luar batas keseimbangan alam untuk melakukan pemulihan (*recovery*). Jika hal tersebut dibiarkan terus menerus, maka kelangsungan



ekosistem hayati akan mengalami kepunahan secara total dan sulit untuk bisa dipulihkan kembali.

Kerugian negara akibat kehilangan penerimaan dan kerusakan lingkungan hidup juga terus terjadi. Berdasarkan publikasi World Bank dengan judul [Indonesia Economic Quarterly Reports \(IEQ\)](#) menyebutkan, kerugian Indonesia dampak kebakaran hutan dan lahan sepanjang 2019 mencapai US\$5,2 miliar atau setara Rp72,95 Triliun (kurs Rp 14.000). Penghitungan kerugian ekonomi oleh Bank Dunia ini berdasarkan kebakaran hutan massif terjadi di delapan provinsi prioritas, yakni, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Riau, Kalimantan Barat, Jambi, Kalimantan Timur dan Papua.

Provinsi Riau salah satu provinsi terkaya di Indonesia, dan sumber dayanya didominasi oleh sumber alam, terutama minyak bumi, gas alam, karet, kelapa sawit dan perkebunan serat. Tetapi, penebangan hutan yang merajalela telah mengurangi luas hutan secara signifikan, dari 78% pada 1982 menjadi hanya 33% pada 2005. Rata-rata 160,000 hektare hutan habis ditebang setiap tahun, meninggalkan 22%, atau 2,45 juta hektare pada tahun 2009. Deforestasi dengan tujuan pembukaan kebun-kebun kelapa sawit dan produksi kertas telah menyebabkan kabut asap yang sangat mengganggu di provinsi ini selama bertahun-tahun, dan menjalar ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Bagi Indonesia, komoditas kelapa sawit memiliki nilai sangat strategis untuk mendukung pembangunan nasional, 1) penggerak utama (*prime mover*) pengembangan agribisnis mulai dari hulu hingga ke hilir 2) penyedia lapangan kerja yang cukup besar dan sebagai sumber pendapatan petani, dan 3) salah satu komoditas yang memiliki peranan besar dalam menghasilkan devisa negara.

Pada tingkat nasional, perkembangan industri kelapa sawit sangat dipengaruhi oleh berbagai isu. **Pertama**, persoalan hak penguasaan lahan antara masyarakat dengan perusahaan (swasta) atau masyarakat dengan pemerintah (PTPN) cenderung menimbulkan berbagai pelanggaran HAM dan menimbulkan ketidakadilan. konsesi dan konversi lahan, membakar lahan untuk pembukaan dan persiapan lahan baru perkebunan kelapa sawit. **Ketiga**, legalitas usaha

perkebunan, banyak perusahaan perkebunan yang tidak memiliki legalitas usaha perkebunan terutama izin lokasi, izin usaha perkebunan, status perolehan lahan usaha perkebunan, hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU) dan bentuk badan hukum perusahaan. **Keempat**, gerakan anti sawit oleh beberapa gerakan non pemerintah ( LSM, NGO dalam dan luar negeri ). **Kelima**, usaha kelapa sawit nasional masih berfokus pada industri hulu, hal ini disebabkan masih banyaknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pada usaha industri hulu, serta belum memadainya 5 M (Man, Money, Machine, Material and Managerial ) sebagai unsur penunjang industri hilir.

Dominasi penguasaan ruang ekstraktif menjadi salah satu penyebab degradasi dan deforestasi menjadi permasalahan utama di daerah tersebut, untuk perkebunan kelapa sawit, diketahui bahwa hampir setengah dari luas daratan Provinsi Riau merupakan lahan perkebunan dan industri kehutanan. Hal ini terlihat dari sebaran industri di Provinsi Riau, secara umum penggunaan lahan berfokus kepada perkebunan kelapa sawit yang hampir mencapai 2 juta ha lebih.

#### Sebaran Industri Di Provinsi Riau

No	Jenis Pemanfaatan/Penggunaan	Luas (Ha)	Jumlah Unit Izin
1	IUPHHK-Hutan Alam/HPH	187.737	4
2	IUPHHK-HTI	2.112.186	146
3	IUPHHK-RE	116.977	4
4	IUPHHBK	29.620	2
5	Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	7.596,35	12
6	Perkebunan Kelapa Sawit dan izin tanaman lainnya (HGU)	2.120.046	
7	Pertambangan	443.882, 71	
8	Perizinan Lainnya	Belum diidentifikasi	
Total		5.018.045,06	

Sumber: Ditjenbun Provinsi Riau

Pembangunan yang sudah dijalankan masih terus menyisakan persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial di Riau khususnya. Riau yang dianugrahi kekayaan alam yang berlimpah ternyata tidak mampu memberikan jaminan kesejahteraan kepada rakyatnya. Hal ini terlihat jumlah penduduk miskin. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Riau, jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Riau Maret 2018 sebesar 500 ribu jiwa (7,39 persen). Adapun sebaran penduduk miskin di Provinsi Riau terjadi di daerah yang memiliki akses jauh dari ibu kota, padahal secara umum sebaran perkebunan kelapa sawit paling banyak berada di luar wilayah ibu kota provinsi.

#### **Sebaran Penduduk Miskin Kabupaten Di Provinsi Riau**

<b>Kabupaten</b>	<b>Persentase Penduduk Miskin</b>
Kepualaun Meranti	28,90
Rokan Hulu	10,91
Pelalalawan	10,25
Kuantan Singingi	9,97
Kampar	8,02
Rokan Hilir	7,88
Indragiri Hilir	7,70
Indragiri Hulu	6,94
Bengkalis	6,85
Siak	5,80
Dumai	4,57
Pekanbaru	3,05

Sumber : Riau dalam angka 2018

Dari data sebaran penduduk diatas terlihat bahwa pengelolaan perkebunan kelapa sawit di beberapa daerah yang menjadi sentra sawit belum menunjukkan hasil positif bagi masyarakat, oleh karena itu perlu untuk melihat sejauh mana pengelolaan perkebunan kelapa sawit dijalankan, apakah telah sesuai dengan asas keberlanjutan yang memperhatikan akses lingkungan, sosial dan ekonomi sebagai asas utama dalam pengelolaan perkebunan.

Terdapat beberapa isu strategis yang mempengaruhi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup belum berjalan dengan baik di Provinsi Riau, **Pertama**, Konflik agraria, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 2016 menyebutkan Riau menjadi Provinsi dengan konflik agraria tertinggi di Indonesia 9,78 %. Berbagai upaya telah dilaksanakan baik secara Litigasi maupun Non-Litigasi, persoalannya adalah penyelesaian konflik tidak memperhatikan sebab timbulnya sengketa, disisi lain penegakan hukum masih lemah menyebabkan diskriminasi penerapan hukum mengakibatkan keadilan dalam hukum belum terwujud.

**Kedua**, Kesadaran perusahaan terhadap usaha perkebunan ramah lingkungan masih rendah, banyak perusahaan yang tidak memenuhi kriteria pengelolaan lingkungan, kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau jumlah lahan terbakar 1 Juli – 20 Oktober tahun 2015 mencapai 169.119 ha, berdampak pada kebijakan *moratorium* dan pengetatan berbagai izin pengelolaan lingkungan bagi pelaku usaha. **Ketiga**, Integrasi peta tata ruang sektor pertanian khususnya tata ruang kelapa sawit belum memadai, perlunya pemetaan tata ruang berupa peta kawasan hutan yang berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, peta pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang ada di kantor BPN, peta Izin Usaha Perkebunan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

**Keempat**, sertifikasi ISPO sebagai salah satu indikator petunjuk tata kelola perkebunan berkelanjutan yang mengedepankan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan belum diminati oleh para pekebun rakyat, prinsip transparansi dan ketelusuran hasil produksi kelapa sawit juga terbilang lemah, akibatnya inisiatif bagi usaha perkebunan rakyat sebagai pemasok Tandan Buah Segar (TBS) untuk perusahaan penghasil minyak kelapa sawit juga terbilang minim.

Sektor perkebunan terutama kelapa sawit dan karet memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Pelalawan. Sebagai salah satu kabupaten penghasil kelapa sawit terbesar di provinsi Riau potensi perkebunan kelapa sawit di daerah tersebut termasuk besar. Perkebunan kelapa sawit diusahakan hampir di semua kecamatan di Pelalawan. Luas areal kelapa sawit tahun 2013 tercatat 118.262,02 ha. Kecamatan tanaman kelapa sawit terluas adalah kecamatan

Pangkalan Kuras 17.602,42 ha. Total produksi selama 2013 sebesar 6.873.432 ton.

Berdasarkan data yang ditampilkan sebelumnya pada sebaran penduduk miskin di Provinsi Riau Kabupaten Pelalawan termasuk memiliki persentase penduduk miskin yang tertinggi dibanding daerah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau, yakni 10,25 %. Hal ini menjadi fokus peneliti untuk melihat sejauh mana sektor perkebunan kelapa sawit terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sejauh ini pemahaman terhadap meningkatnya jumlah luas wilayah perkebunan berbanding lurus dengan jumlah peningkatan pendapatan, yang menjadi persoalan adalah sebagai besar lahan perkebunan yang dimiliki mayoritas dimiliki oleh perusahaan besar, sedangkan sebagian kecil dimiliki oleh masyarakat, hal ini menjadi salah satu indikator kenapa luas lahan perkebunan belum memberikan pemerataan pada masyarakat.

Selain itu pengelolaan perkebunan kelapa sawit menyisakan dampak lingkungan, ditengah perannya yang besar terhadap perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, industri kelapa sawit harus menghadapi berbagai tantangan yang semakin besar, khususnya mengenai isu lingkungan. Emisi karbon dan kerusakan ekosistem dari lahan gambut adalah isu terkini yang dihembuskan oleh berbagai NGO nasional dan internasional. Oleh karena itu, pihak Uni Eropa dan Amerika memberikan perhatian yang besar terhadap isu lingkungan ini dan dikaitkan dengan adanya pemanasan global (global warming).

Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Perkebunan kelapa sawit tidak hanya dikembangkan pada tanah mineral tetapi juga pada lahan gambut. Meskipun sebagian lahan gambut sesuai untuk kelapa sawit, pengembangan kelapa sawit memperoleh berbagai kecaman khususnya disebabkan oleh emisi karbon, baik karena pembakaran lahan pada saat land clearing dan dekomposisi gambut. Indonesia diklaim menjadi emiter CO<sub>2</sub> ketiga terbesar di dunia dan penyumbang emisi terbesar dari sektor pertanian, kehutanan, dan pemanfaatan lahan gambut untuk penggunaan lainnype. Berdasarkan hal tersebut maka penting untuk dipahami bahwa tidak semua lahan gambut sesuai untuk kelapa sawit. Evaluasi kesesuaian lahan harus dilakukan untuk menyeleksi lahan gambut agar pengusahaan kelapa sawit dapat berkelanjutan.

Pemerintah daerah sebenarnya memiliki peran yang strategis dalam mencounter berbagai isu lingkungan yang ada dengan memberikan pemahaman terhadap para pengelola perkebunan kelapa sawit untuk mengelola perkebunan secara berkelanjutan, apalagi ada berbagai perdebatan yang saling bertentangan yang timbul akibat adanya kegiatan perkebunan kelapa sawit. Pusat Penelitian Kelapa Sawit misalnya dalam laporannya menjelaskan bagaimana isu negatif lingkungan yang terjadi dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit sebenarnya bertolak belakang, berbagai kajian ilmiah terkait dengan isu negatif lingkungan di counter dengan data atau pengukuran ilmiah.

Peneliti melihat ada ruang kosong yang belum dilakukan oleh pemerintah daerah dalam Pengelolaan lingkungan hidup, sudah seharusnya dilaksanakan secara terpadu dari tingkat atas sampai kepada tingkat bawahnya, dalam arti perlunya terlaksananya koordinasi yang baik antara pusat dan daerah serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, komunikasi implementasi kebijakan deliberative merupakan salah satu konsep implementasi kebijakan yang mengedepankan aspek musyawarah dalam pelaksanaan kebijakan, fungsi komunikasi public menjadi bonus dari kebijakan deliberative mengingat dalam tiap proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan peran serta masyarakat diberikan secara luas.

Dari berbagai latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, maka peneliti memandang perlu untuk meneliti kapasitas advokasi dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam, adapun judul penelitian ini adalah *“Komunikasi Implementasi Kebijakan Deliberatif Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Di Kabupaten Pelalawan”*

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena yang diungkapkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana komunikasi implementasi kebijakan deliberatif Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Pelalawan ?
- b. Apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi komunikasi implementasi kebijakan deliberatif Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Pelalawan ?

## **C. Tujuan dan Maksud Penelitian**

Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui komunikasi implementasi kebijakan deliberatif Dinas Lingkungan Hidup dalam proses mengampanyekan sadar lingkungan dalam kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Kabupaten Pelalawan, sedangkan maksud penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis komunikasi implementasi kebijakan deliberatif Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Pelalawan.
- b. Menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi komunikasi implementasi kebijakan deliberatif Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Pelalawan.

#### **D. Luaran/Output Penelitian**

Penelitian ini diupayakan untuk mencapai output/luaran berupa :

1. Jurnal dan/atau publikasi internasional terindeks scopus
2. Pendaftaran HKI untuk karya ilmiah
3. Pengkayaan bahan ajar

#### **E. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Teori / konsep yang relevan**

###### **a. Kebijakan Publik**

Pendekatan dan model yang digunakan oleh para ahli pada akhirnya akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan (Winarno, 2007: 16). Definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye (1975, dalam Syafiie (2006: 105) menyatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (*whatever government choose to do or not to do*)”.

Dye dalam Harbani Pasolong (2008) mengemukakan bahwa bila pemerintah mengambil suatu keputusan maka harus memiliki tujuan yang jelas, dan kebijakan publik mencakup semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Sementara Carl Friedrich (dalam Winarno 2007: 17) mengemukakan bahwa: Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Adapun pengertian lain mengenai kebijakan publik diungkapkan Anderson dalam (Agustino, 2006:7). Menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah : “Serangkaian kegiatan yang mempunyai



maksud dan tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok faktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperlukan”.

Kemudian Chandler dan Plano dalam (Pasalong, 2013:38) beranggapan bahwa : “kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang continue oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat, agar mereka dapat hidup dan berpartisipasi dalam pemerintahan”.

Kesimpulannya kebijakan public adalah kebijakan yang dalam proses perumusan dan tujuannya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan harus sejalan dengan dinamika yang terjadi didalam masyarakat, hal ini bertujuan agar kebijakan yang dibuat dirasakan manfaat dan hasil gunanya oleh masyarakat.

#### **b. Kebijakan Publik Deliberatif**

Deliberatif berasal dari kata bahasa latin “*deliberatio*” yang berarti konsultasi, musyawarah atau menimbangnimbang. Sebuah forum musyawarah masyarakat dapat dikatakan deliberasi jika mencakup aspek *influence*, *inclusion* dan *deliberation*.

*Deliberative democracy* (demokrasi deliberatif) masih tetap dianggap penting dan relevan untuk dilakukan bagi terciptanya proses demokrasi dalam nuansa *good governance*. Strategi kesinambungan dalam peningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam merumuskan kebijakan melalui kegiatan musyawarah diharapkan mampu mendukung pemegang kekuasaan untuk merumuskan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Salah satu kriteria untuk mencapai sebuah kebijakan yang baik adalah memerlukan penguatankeputusan dari sebuah kebijakan melalui ruang dialog publik yang bersifat deliberatif.

Sesuai konteks masyarakat demokartis, akses untuk menyampaikan opini public terjamin oleh negara, dimana opini publik

lahir dari setiap pembicaraan para individu yang kemudian membentuk *public body*. Habermas menambahkan bahwa warga berperilaku sebagai *public body* ketika mereka berbicara dalam cara yang tidak dilarang yaitu dengan jaminan kebebasan berserikat dan berkumpul serta kebebasan untuk mengekspresikan dan mempublikasikan pendapat tentang kepentingan umum.

Inti dari pemikiran Habermas tersebut, ialah semua produk hukum dan kebijakan yang dibuat oleh negara baik legislatif, eksekutif dan yudikatif harus melalui proses pengujian dan diskursus oleh *civil society* diikuti dengan kriteria pengambilan kebijakan publik secara deliberatif.

Adapun kriteria pengambilan keputusan yang dapat dikategorikan sebagai proses yang deliberatif menurut Habermas dalam Tresiana (2015:68) yaitu:

- a. *Influence, the process should have the ability to influence policy and decision making,*
- b. *Inclusion, the process should be representative of the population and inclusive to diverse view points and values, providing equal opportunity for all participate, and*
- c. *Deliberation, the process should provide open dialogue, acces to information, respect, space to understand and reform issues, and movement toward consensus.*

### **c. Implementasi Kebijakan Publik**

Kebijakan publik memiliki proses atau tahapan-tahapan yang perlu di lalui. Ada tiga proses atau tahapan-tahapan pokok kebijakan publik yang harus dilalui yaitu diantaranya tahapan formulasi kebijakan, tahapan implementasi kebijakan dan yang terakhir tahapan evaluasi kebijakan. Akan tetapi, dari tiga proses atau tahapan-tahapan tersebut implementasi kebijaksanaan merupakan tahapan yang paling dominan diantara formulasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Implementasi kebijakan adalah suatu tahap yang paling krusial dalam proses kebijakan publik, karena suatu program kebijakan publik harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Model dalam kebijakan publik merupakan penjelasan secara abstrak atau perwakilan dari kehidupan politik. Model berusaha untuk memperjelas, menyederhanakan, dan memberikan pengertian mengenai hal-hal yang sebenarnya dianggap penting bagi politik dan kebijakan publik. Pentingnya sebuah model menjelaskan kehidupan politik dan kebijakan publik, sepenuhnya tergantung pada apa dan bagaimana kriteria sebuah model tersebut dalam menjelaskan perihal politik dan kebijakan publik.

- a) Model Kebijakan Van Metter dan Van Horn Model pendekatan implementasi kebijakan yang digunakan oleh Van Metter dan Van horn disini ialah model top-down. Proses implementasi kebijakan ini merupakan sebuah performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan publik yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi publik yang sesuai dengan harapan yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variable. Model ini mengumpamakan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksanaan, dan kinerja dari kebijakan publik. Menurut Van Metter & Van Horn ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja dari pengimplementasian kebijakan publik diantaranya sebagai berikut : Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber-Sumber Kebijakan, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap atau Kecenderungan para Pelaksana, Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan, Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik
- b) Model implementasi kebijakan merilee S. Grindle, Model ini menggambarkan bahwa implementasi ditentukan oleh isi

kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilan ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut : (1) kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan; (2) jenis manfaat yang dihasilkan; (3) derajat perubahan yang diinginkan; (4) kedudukan pembuat kebijakan; (5) siapa pelaksana program; (6) sumber daya yang dikerahkan. Sementara itu, konteks implementasinya adalah : (1) kekuasaan, kepentingan dan strategi; (2) karakteristik lembaga dan penguasa; (3) kepatuhan dan daya tanggap. Keunikan model grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut pada implementor, penerima implementasi serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan

- c) Model implementasi kebijakan George C. Edward III, Model kebijakan implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward ini berperspektif *top-down*. Menurut George C. Edward ada 4 (empat) variable yang sangat menentukan untuk keberhasilan dari suatu implementasi kebijaka publik, dianatanaya adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu, melalui empat faktor ini kemudian akan dapat diidentifikasi hambatan dalam mencapai keberhasilan dari suatu proses pelaksanaan kebijakan.

#### **d. Komunikasi Publik**

Ada beragam definisi komunikasi yang dikemukakan oleh para ahli. Tetapi definisi komunikasi secara umum yaitu proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Berikut ini adalah beberapa definisi dari komunikasi :

Menurut Hovland, Janis dan Keley yang dikutip Djuarsa dalam buku Pengantar Komunikasi, definisi komunikasi adalah : Suatu proses melalui seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lain. (1990:7)

Selain itu Tubbs dan Moss mendefinisikan komunikasi sebagai Proses penciptaan makna antara dua orang atau lebih. (2004:59)

Menurut Effendy dalam buku Ilmu Komunikasi Teori dan Filsafat Komunikasi mengatakan : Hakikat komunikasi adalah proses pernyataan antar manusia, pernyataan tersebut berupa pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalur. (2003:28)

Menurut Dedy Mulyana pada buku Ilmu komunikasi Suatu Pengantar terdapat beberapa tipe komunikasi yang disepakati oleh para pakar yaitu :

- a) Komunikasi Intrapribadi, komunikasi Intrapribadi adalah komunikasi dengan diri sendiri, baik kita sadari atau tidak.
- b) Komunikasi Antarpribadi, komunikasi Antarpribadi adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal atau nonverbal.
- c) Komunikasi Kelompok, komunikasi Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lainnya untuk mencapai

tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut.

- d) Komunikasi Publik, komunikasi Publik adalah komunikasi antara seorang pembicara dengan sejumlah besar orang (khalayak) yang tidak bisa dikenal satu persatu.
- e) Komunikasi Organisasi, komunikasi Organisasi terjadi dalam suatu organisasi, bersifat formal dan juga informal, dan berlangsung dalam suatu jaringan yang lebih besar daripada komunikasi kelompok.
- f) Komunikasi Massa (*Mass Communication*), *Komunikasi Massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak atau elektronik. (2005:72-75)*

Komunikasi publik adalah pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau yang di luar organisasi, secara tatap muka atau melalui media (Arni, 2008:7). Pengertian lain mengatakan bahwa komunikasi publik merupakan suatu komunikasi yang dilakukan di depan banyak orang. Dalam komunikasi publik pesan yang disampaikan dapat berupa suatu informasi, ajakan, gagasan. Sarananya, bisa media massa, bisa pula melalui orasi pada rapat umum atau aksi demonstrasi, blog, situs jejaring sosial, kolom komentar di website/blog, e-mail, milis, SMS, surat, surat pembaca, reklame, spanduk, atau apa pun yang bisa menjangkau publik.

Secara umum Komunikasi Publik memerlukan keterampilan komunikasi lisan dan tulisan agar pesan dapat disampaikan secara efektif dan efisien. Komunikasi publik sering juga disebut dengan komunikasi massa. Namun, komunikasi publik memiliki makna yang lebih luas dibanding dengan komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan komunikasi yang lebih spesifik, yaitu suatu komunikasi

yang menggunakan suatu media dalam menyampaikan pesannya (Richard, 2008:5)

#### **e. Pengelolaan Sumber Daya Alam**

Sumber daya adalah sesuatu yang memiliki nilai guna. Sumber Daya Alam (SDA) adalah keseluruhan faktor fisik, kimia, biologi dan sosial yang membentuk lingkungan sekitar kita. Hunker dkk menyatakan bahwa sumber daya alam adalah semua yang berasal dari bumi, biosfer, dan atmosfer, yang keberadaannya tergantung pada aktivitas manusia. Semua bagian lingkungan alam kita (biji-bijian, pepohonan, tanah, air, udara, matahari, sungai) adalah sumber daya alam. SDA adalah unsur-unsur yang terdiri dari SDA nabati (tumbuhan) dan SDA hewani (satwa) dengan unsur non hayati disekitarnya yang secara keseluruhan membentuk ekosistem<sup>1</sup>. SDA memiliki peranan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Secara yuridis, pengertian SDA termuat dalam Pasal 1 ayat 9 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ialah SDA adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

Terdapat beberapa pendapat mengenai pembagian sumberdaya alam. antara lain ditinjau dari sifat umum ekosistemnya dibagi menjadi dua golongan besar yaitu SDA terestris (daratan) dan SDA akuatik (perairan). Meskipun demikian, dalam pengelolaan SDA umumnya dikenal tiga macam sumberdaya alam didasarkan pada sifatnya, yaitu :

- a) Sumber daya alam yang dapat dipulihkan (renewable resources), dimana aliran sumberdaya tergantung kepada manajemennya, dengan beberapa kemungkinan persediaannya dapat menurun, lestari atau meningkat. Contoh tanah, hutan dan margasatwa.
- b) Sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan (non renewable atau deposit resources), dimana persediaan tetap

dan sumberdaya alam ini terdiri dari: 1) Secara fisik persediaan akan habis seluruhnya. Contoh: batu bara, minyak bumi, gas alam. 2) Persediaan menurun, tetapi dapat digunakan kembali (daur ulang). Contoh: kelompok logam dan karet.

- c) Sumber daya alam yang tak akan habis (continuous atau flow resources), dimana tersedia secara berkelanjutan terdiri dari: 1) Persediaannya tidak terbatas dan tidak terpengaruh oleh tindakan manusia. Contoh : energi matahari, energi pasang surut. 2) Persediaannya tidak terbatas, tetapi terpengaruh oleh tindakan manusia. Contoh : bentang alam, keindahan alam, ruang angkasa dan udara.

Sumber daya alam (SDA) merupakan rahmat karunia Tuhan YME yang harus dikelola secara baik dan benar agar dapat memberikan manfaat kepada manusia secara maksimal dan lestari. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan mengembangkan dan memanfaatkan SDA yang ada.

Dalam pemanfaatan SDA melalui pembangunan senantiasa terjadi perubahan ekosistem yang pada akhirnya memberi dampak positif (manfaat) ataupun dampak negatif (resiko) terhadap manusia kembali. Semakin besar manfaat yang akan diupayakan, semakin besar pula resiko yang ada ataupun muncul resiko baru (Soemarwoto, 1985).

Pengelolaan SDA (natural resource management) dimaksud untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan yang tinggi, aman dan manusiawi terjamin. Hanya dalam kondisi kualitas lingkungan yang tinggi, manusia lebih banyak memperoleh manfaat dari pada resiko lingkungan. Secara lebih spesifik pengertian pengelolaan SDA meliputi dua hal sebagai berikut:

- 1) Usaha manusia dalam mengubah ekosistem SDA agar dapat diperoleh manfaat yang maksimal (maximum yield) dan berkesinambungan (sustained yield).



- 2) Proses pengalokasian SDA dalam ruang dan waktu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan senantiasa mengupayakan a) pertimbangan antara populasi manusia dan sumberdaya. b) pencegahan kerusakan sumberdaya alam (dan lingkungan).

Oleh karenanya ruang lingkup SDA adalah inventarisasi perencanaan, pelaksanaan/pemanfaatan dan pengendalian/pengawasan. Pada dasarnya hanya SDA yang dapat dipulihkan/diperbaharui (renewable) yang benar-benar dikelola. Sedangkan SDA yang tidak dapat dipulihkan (non-renewable) hanya mengalami eksploitasi tidak dapat dibina kembali.

SDA berdasarkan sifatnya dapat digolongkan menjadi SDA yang dapat diperbaharui dan SDA yang tidak dapat diperbaharui. SDA yang dapat diperbaharui ialah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. SDA yang tidak dapat diperbaharui yaitu SDA yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya dan apabila digunakan secara terus menerus akan habis seperti contoh tumbuhan, hewan, mikro organisme, sinar matahari, angin, dan air. Kebutuhan SDA meningkat dikarenakan pertambahan penduduk serta kemajuan pembangunan. SDA yang terbatas bahkan menurun. Tanpa upaya pelestarian atau konservasi maka terjadi krisis SDA, kualitas menurun, persediaan langka, keanekaragaman berkurang, dll. Pemanfaatan SDA dibagi berdasarkan sifatnya, yaitu SDA Hayati dan Non Hayati. Pasal 12 ayat 1 UU No.32 tahun 2009 menyatakan pemanfaatan SDA dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

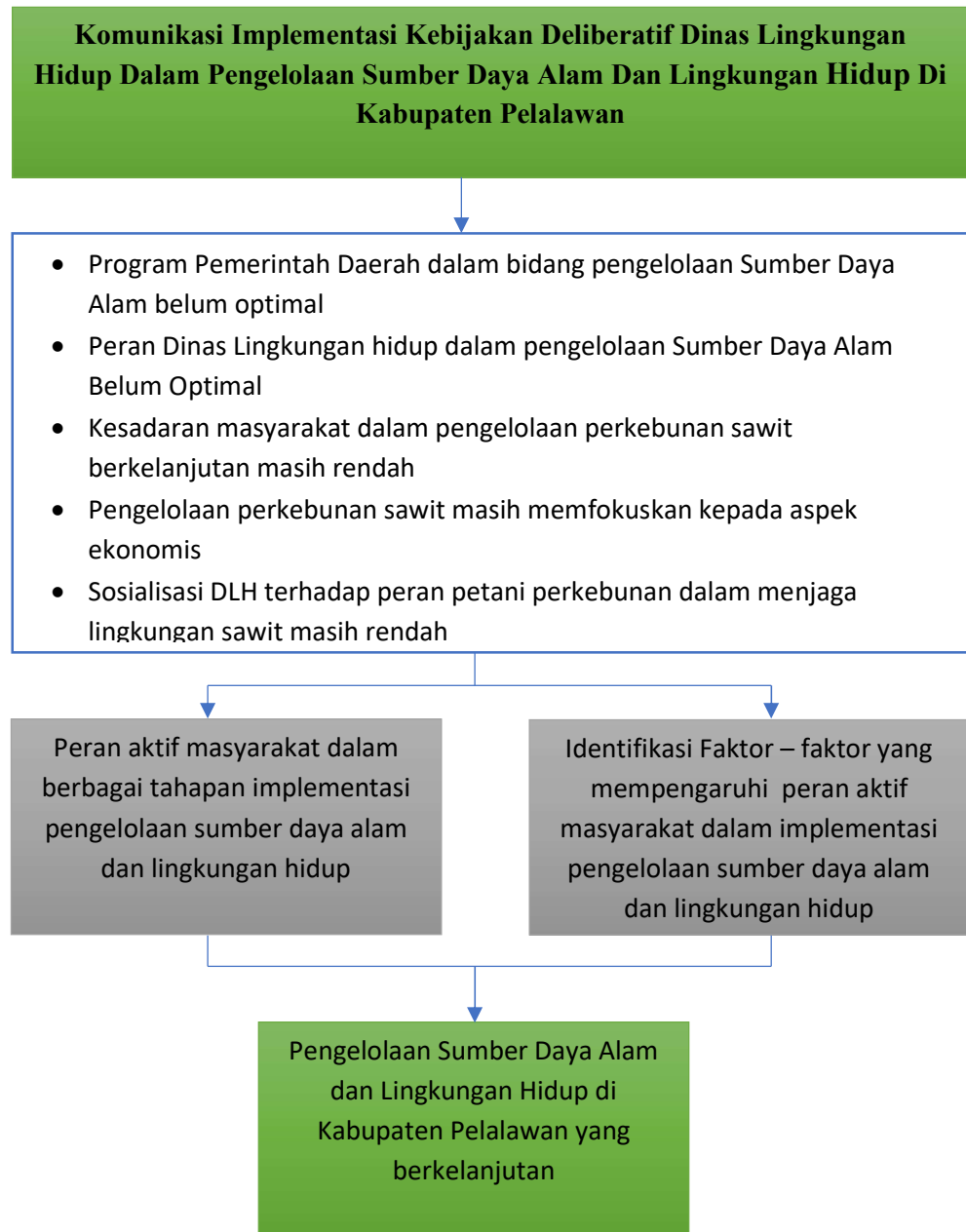
## 2. Penelitian Terdahulu

Beberapa karya ilmiah yang memiliki kesamaan topik dengan kata kunci komunikasi implementasi kebijakan deliberatif Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, diantaranya sebagai berikut :

<b>Nama Peneliti, Tahun Penelitian</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Herda Sabriyah Dara Kospa, 2016	Konsep Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan	Pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dapat dicapai dengan memecahkan permasalahan yang terjadi pada aspek ekonomi, sosialpolitik, dan lingkungan. Permasalahan perkebunan kelapa sawit ini perlu diatasi supaya tidak mendistorsi daya saing produk-produk kelapa sawit Indonesia di pasar global serta mengantisipasi potensi konflik dari ketiga aspek ini. Berdasarkan uraian yang telah diperoleh dalam pembahasan makalah ini, dapat
FN Andriati, I Gusti Putu Wigena, 2011	Penguatan Aspek Kelembagaan Program Revitalisasi Perkebunan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Plasma	Aktor kunci yang perlu ditingkatkan peranannya adalah kelompok tani (Poktan), pemerintah daerah (PEMDA), dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Peningkatan peranan aktor tersebut harus diiringi dengan peningkatan pendapatan petani, pendapatan asli daerah (PAD), dan penciptaan lapangan kerja sebagai tujuan dari alur kelembagaan yang dibangun. Pengelolaan perkebunan kelapa sawit plasma yang berpijak pada peningkatan peranan petani melalui pembentukan Poktan atau gabungan kelompok tani (Gapoktan) sebagai alternatif yang berpeluang tertinggi untuk keberhasilan perkebunan kelapa sawit plasma. Berdasarkan peran dan keterkaitan stakeholders, alur kelembagaan model Perintisan Kemandirian Petani Plasma (PRIMATAMA) merupakan alternatif yang cukup sesuai dengan kondisi di lapangan.

Febri Yuliani, 2019	Implementasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan Perkebunan Sawit Rakyat Pada Lahan Gambut	Hasil penelitian menunjukkan pembangunan sub sektor perkebunan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah harus mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan selaras dengan potensi sumber daya alam yang tersedia. Sehingga peran penting perkebunan sebagai penggerak perekonomian sebagai penggerak perekonomian daerah, mendukung pengembangan wilayah, penyerapan tenaga kerja, pendorong pengembangan industri hilir, penyumbang pendapatan daerah, penyedia devisa negara serta peran pentingnya mendukung kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup akan semakin meningkat.
---------------------	--	---

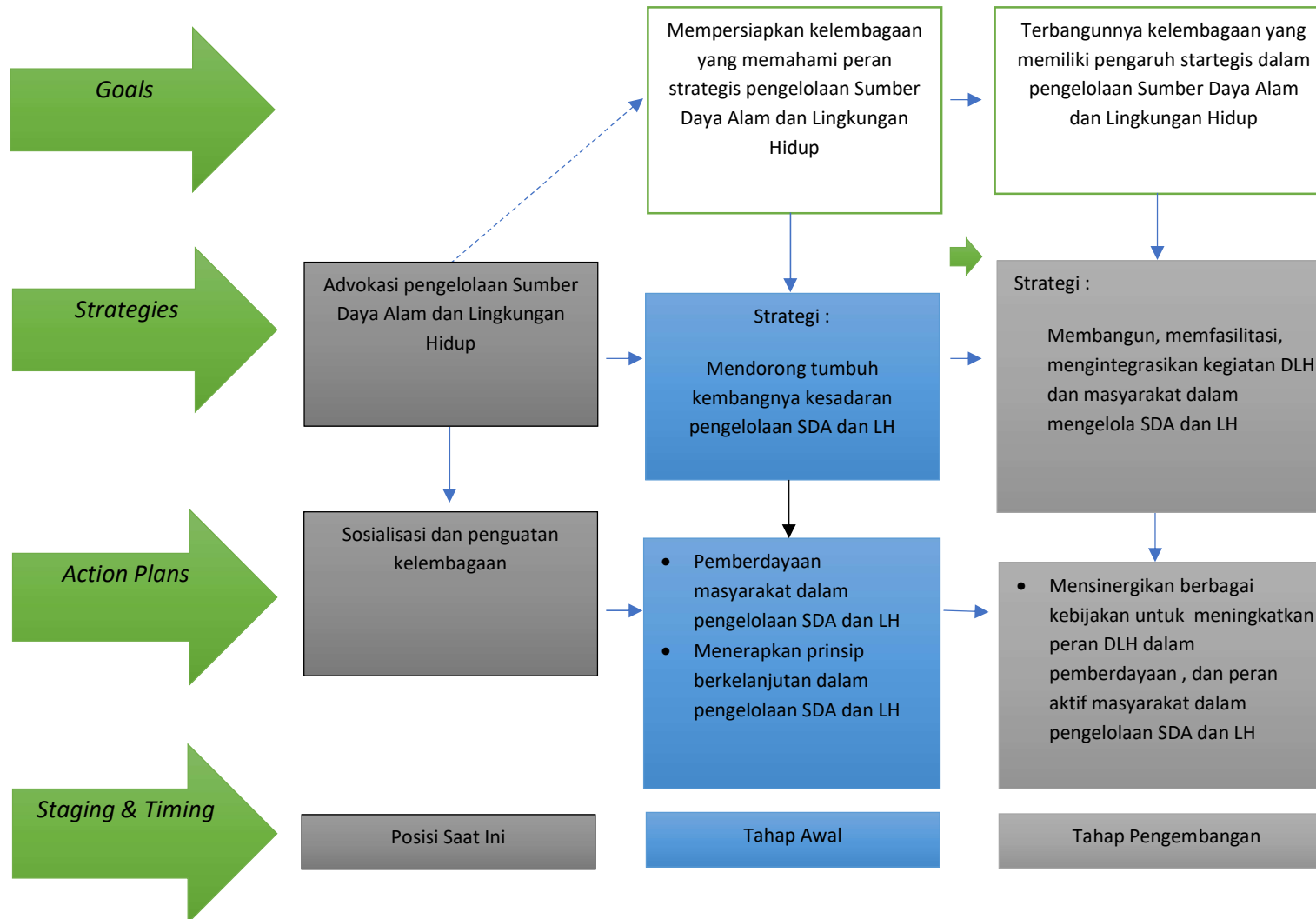
### 3. Kerangka Pemikiran



**Gambar : Kerangka Pemikiran**

#### 4. Road Map Penelitian

*Road Map* komunikasi implementasi kebijakan deliberatif Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Pelalawan



## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian komunikasi implementasi kebijakan deliberatif Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Pelalawan ini adalah metode penelitian kualitatif.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian di fokuskan di Kabupaten Pelalawan. Hal ini peneliti lakukan untuk melihat komunikasi implementasi kebijakan deliberatif Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Pelalawan

### **3. Informan Penelitian**

Informan Penelitian dalam penelitian, untuk mendukung dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini yaitu:

- a. Masyarakat petani dan pekebun
- b. Pemerintah Desa
- c. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Pelalawan
- d. NGO yang terkait dengan Isu Lingkungan

### **4. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder yang terkait dengan komunikasi implementasi kebijakan deliberatif Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Pelalawan

Data Primer, data ini meliputi:

1. Data hasil wawancara
2. Data hasil observasi

Data Sekunder, data ini diperoleh dari instansi-instansi terkait, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), dan hasil penelitian lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini baik berupa jurnal, laporan kajian dari instansi-instansi terkait.

Data sekunder yang dibutuhkan meliputi:

1. Data regulasi program pengelolaan sumber daya alam bidang dan lingkungan hidup
2. Data referensi (jurnal, media massa, buku dan lain-lain )
3. Data Monografi lokasi penelitian

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara, yaitu dengan cara mewawancarai secara mendalam terhadap informan yang telah ditentukan agar dapat memberikan informasi yang dibutuhkan secara komprehensif dan faktual terhadap komunikasi implementasi kebijakan deliberatif Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Wawancara dilakukan untuk : (a) mengetahui permasalahan lingkungan yang muncul dalam pengelolaan; (b) mengetahui permasalahan dan pendapat dari *stakeholders* tentang pengelolaan; (c) mengetahui pendapat pakar atau ahli tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
2. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap lokasi penelitian, mengamati aktivitas masyarakat, dinas lingkungan hidup, serta memahami secara mendalam kondisi kelembagaan ditengah para petani dan pekebun dan pihak swasta, dalam komunikasi implementasi kebijakan deliberatif Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

## 6. Teknik Analisa Data

Analisis Deskriptif dilakukan untuk mengetahui sejauhmana komunikasi implementasi kebijakan deliberatif Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Pelalawan, dan status terkini Kondisi. Analisis deskriptif juga dilakukan terhadap partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hutan. Serta berbagai kebijakan dan aturan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Pelalawan.

## G. Jadwal Kegiatan

Adapun jadwal penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tahun Pertama**

No	Kegiatan	Bulan							
		April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov
1	Persiapan Administrasi								
2	Perijinan dan pra lapangan								
3	Seminar & Workshop								
4	Penyusunan Instrumen								
5	Pembekalan asisten lapangan								
6	Observasi lapangan dan pengumpulan data sekunder								
7	Proses entri data								
8	Proses cleaning data								
9	Analisis data								
11	Pembuata laporan								
12	Penyampaian laporan dan Desiminasi hasil penelitian								



## H. Daftar Pustaka

- Anni Milen. 2004. Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas. Diterjemahkan secara bebas. Yogyakarta: Pondok Pustaka Jogja.
- BPS-Statistics Indonesia. (2015). Statistik Indonesia (Statistical year book of Indonesia) 2015. Jakarta: BPS-Statistics Indonesia.
- Budi Winarno, 2007. Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi, Media Presindo. Yogyakarta.
- Darmawan, D. H. A. (2015). Update of Palm Oil Industry in Indonesia. Presentation on ISPO Promotion, 12 October 2015. Indonesian Palm Oil Board (IPOB), The Hague, Netherlands
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2014). Statistik perkebunan Indonesia 2013–2015: Kelapa Sawit. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian RI.
- Food and Agricultural Organization (FAO). (2010b). FAOSTAT. Rome: Food and Agricultural Organization.
- Grindle, M.S., (editor), 1997, Getting Good Government : Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries, MA: Harvard Institute for International Development. Boston.
- Mangabarani, A. (2009a). Memaknai sebuah anugerah: Sumbangsih kelapa sawit Indonesia bagi dunia. Jakarta: Ideals Agro Akbar.
- May-Tobin, C., Boucher, D., Decker, E., Hurowitz, G., Martin, J., Mulik, K., Roquemore, S., et al. (2012). Recipes for success. Solutions for Deforestation-Free Vegetable Oils. Massachusetts: Union of Concerned Scientists.
- Nediasari, D. (2017). Konsumen Indonesia & industri kelapa sawit. Makalah dipresentasikan pada RSPO General Lecture UNRI, 18 Agustus 2017. RSPO, Pekanbaru.
- Rumondang, T. (2017). Transforming the market to make sustainable palm oil the norm. Paper presented at the RSPO General Lecture UNRI, 18 Januari 2017. Pekanbaru: RSPO.

### I. Rekapitulasi Biaya

Adapun rekapitulasi pembiayaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. Rencana Pembiayaan Penelitian**

NO	ITEM	JUMLAH
1	Belanja Bahan Habis Pakai dan Peralatan	3.100.000
2	Pelaksanaan Pengumpulan Data	22.305.000
3	Analisis Data	8.400.000
4	Pelaporan, Luaran Wajib dan Luaran Tambahan	16.195.000
	TOTAL	<b>50,000,000</b>

TERBILANG

: *Lima Puluh Juta Rupiah*

### J. Susunan Organisasi Dan Pembagian Tugas Tim Peneliti

Adapun susunan organisasi dan pembagian tugas peneliti, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. Susunan Organisasi dan Pembagian Tugas Peneliti**

No	Nama	NIDN	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian tugas
1.	Dr. Hasim As'ari. S.Sos., M.Si	0014117904	Ilmu Administrasi Publik	12 jam /minggu	1. Mempersiapkan draf awal proposal 2. Mengkoordinasi diskusi proposal 3. Menyiapkan instrumen penelitian 4. Mengkoordinasi penelitian lapangan 5. Mengkoordinasi analisis data 6. Mengkoordinasi wawancara dan observasi 7. Menyusun laporan, seminar dan melakukan publikasi ilmiah
2.	Prof. Dr. Sujianto,M..Si	0028096201	Kebijakan Publik	10 jam /minggu	1. Mitra diskusi drafting proposal 2. Mensuplay konseptual

					3. Melakukan wawancara dalam aspek internal dan eksternal 4. Pendamping wawancara dan observasi 5. Melakukan input data kualitatif 6. Mitra diskusi dalam penyusunan laporan akhir
3.	Syofian,S.Sos., M.Si	1003108801	Kebijakan Publik	10 jam /minggu	1. Melakukan wawancara dalam aspek internal dan eksternal 2. Pendamping wawancara dan observasi 3. Melakukan input data kualitatif 4. Mitra diskusi dalam penyusunan laporan akhir
4.	Dedi Kusuma Habibie, S.IP., MPA	0015129102	Organisasi	10 jam /minggu	1. Melakukan wawancara dalam aspek internal dan eksternal 2. Pendamping wawancara dan observasi 3. Melakukan input data kualitatif 4. Mitra diskusi dalam penyusunan laporan akhir

## K. Justifikasi Anggaran Penelitian

Untuk mengetahui justifikasi anggaran yang digunakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4**

### Justifikasi Anggaran Penelitian

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Pajak			
						PPn		PPh 21 22 23	
A.	BAHAN				Rp 3,100,000.00	%	Rp	%	Rp
1	Alat Tulis Kantor (ATK)	2	Paket	Rp 500,000.00	Rp 1,000,000.00	10%	Rp 100,000.00	3%	Rp 33,333.33
2	Dokumentasi	1	Paket	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00	10%	Rp 50,000.00	3%	Rp 16,666.67
3	Sekretariat	2	Bulan	Rp 300,000.00	Rp 600,000.00			4%	Rp 15,000.00
5	Cetak Spanduk	2	PCS	Rp 250,000.00	Rp 500,000.00	10%	Rp 50,000.00	3%	Rp 16,666.67
6	Foto Copy Data Sekunder	1	Paket	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00	10%	Rp 50,000.00	3%	Rp 16,666.67
B.	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA				Rp 22,305,000.00	%	Rp	%	Rp
1	Tenaga Surveyor	180	Kuesioner	Rp 8,000.00	Rp 1,440,000.00			4%	Rp 36,000.00
2	Pembantu Peneliti	8	OH	Rp 80,000.00	Rp 640,000.00				
3	FGD Hasil Penelitian Kabupaten Pelalawan	1	Paket	Rp 5,000,000.00	Rp 5,000,000.00				
4	Biaya Administrasi di Desa	4	Paket	Rp 1,000,000.00	Rp 4,000,000.00				
5	Akomodasi Kabupaten Pelalawan	15	OH	Rp 350,000.00	Rp 5,250,000.00				

6	Sewa Kendaraan (BBM, Driver, Mobil)	5	Perhari	Rp 875,000.00	Rp 4,375,000.00			4%	Rp 109,375.00
7	Perizinan (Kabupaten dan Desa)	2	Paket	Rp 800,000.00	Rp 1,600,000.00				
<b>C.</b>	<b>ANALISIS DATA</b>				<b>Rp 8,400,000.00</b>	<b>%</b>	<b>Rp</b>	<b>%</b>	<b>Rp</b>
1	Pengolahan data Primer	2	Paket	Rp 1,050,000.00	Rp 2,100,000.00			4%	Rp 52,500.00
2	Pengolahan Data Sekunder	2	Paket	Rp 1,050,000.00	Rp 2,100,000.00			4%	Rp 52,500.00
3	Tenaga Administrasi 1	60	Jam	Rp 35,000.00	Rp 2,100,000.00			5%	Rp 42,000.00
4	Tenaga Administrasi 2	60	Jam	Rp 35,000.00	Rp 2,100,000.00			5%	Rp 42,000.00
<b>D.</b>	<b>PELAPORAN, LUARAN WAJIB DAN LUARAN TAMBAHAN</b>				<b>Rp 16,195,000.00</b>	<b>%</b>	<b>Rp</b>	<b>%</b>	<b>Rp</b>
1	Pengadaan Draf Laporan	8	Eks	Rp 22,500.00	Rp 180,000.00	10%	Rp 18,000.00	3%	Rp 6,000.00
2	Pengadaan Laporan Kemajuan	8	Eks	Rp 35,000.00	Rp 280,000.00	10%	Rp 28,000.00	3%	Rp 9,333.33
3	Pengadaan Laporan Akhir	10	Eks	Rp 60,000.00	Rp 600,000.00	10%	Rp 60,000.00	3%	Rp 20,000.00
4	Pembuatan Artikel Conference	1	Paket	Rp 2,000,000.00	Rp 2,000,000.00	10%	Rp 200,000.00	3%	Rp 66,666.67
5	Pembuatan Artikel International	1	Paket	Rp 8,500,000.00	Rp 8,500,000.00	10%	Rp 850,000.00	4%	Rp 212,500.00
6	Seminar Internasional	1	Paket	Rp 4,635,000.00	Rp 4,635,000.00	10%	Rp 463,500.00	4%	Rp 115,875.00
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp 50,000,000.00</b>		<b>Rp 1,869,500.00</b>		Rp 857,083.33